

## **Kolaborasi Stakeholder Dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar**

**Rifki Rositasari, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret  
email: rifkirosita18@student.uns.ac.id

### **Abstrak**

Salah satu program pengentasan kumuh ialah program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program KOTAKU diinisiasi di Indonesia sejak tahun 2015, program ini diselenggarakan untuk menangani masalah kumuh yang dilakukan melalui platform kolaborasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses kolaborasi stakeholder dalam perencanaan program Kotaku di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi ketercapaian hasil dalam perencanaan program KOTAKU. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori proses kolaborasi dari Ansell dan Gash. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan KOTAKU di Kecamatan Jaten telah dilakukan kolaborasi oleh berbagai stakeholder yang sudah berjalan dengan baik. Meski demikian dalam keberjalanannya juga ditemui sejumlah kendala. Proses kolaborasi yang dilakukan dimulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan Hasil Sementara. Terdapat faktor yang mempengaruhi kolaborasi yakni faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong kolaborasi yakni faktor sosialisasi dan stakeholder bersama-sama dalam mengidentifikasi masalah. Sementara untuk faktor penghambatnya yaitu adanya perbedaan pendapat dan Kendala waktu.

**Kata Kunci: Kolaborasi; Stakeholder; Perencanaan dan KOTAKU**

### **Abstract**

One of the slum alleviation programs is the KOTAKU (City Without Slums) program. The KOTAKU program was initiated in Indonesia since 2015, this program was organized to deal with issues of the year through a collaborative platform. The purpose of this study was to determine the process of stakeholder collaboration in the Kotaku planning program in Jaten District, Karanganyar Regency. In addition, it also analyzes what factors affect the achievement of results in the planning of the KOTAKU program. This study analyzes using the collaboration process theory from Ansell and Gash. The approach used is descriptive qualitative. Data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study indicate that at the planning stage of KOTAKU in the District of Jaten, collaborations have been carried out by various stakeholders which have been going well. However, along the way, a number of obstacles were encountered. The collaboration process is carried out starting from face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, Share understanding and Intermediate outcomes. There are factors that influence collaboration, namely the driving and inhibiting factors. The driving factor for collaboration is socialization and stakeholders are joint factors in identifying problems. Meanwhile, the inhibiting factors are differences of opinion and time constraints

**Keywords: Collaboration, Planning, Stakeholders, and KOTAKU**

## Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus Penduduk 2020 yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) diketahui jika per september 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan sensus tahun 2010 (BPS, 2021).

**Gambar 1.**  
**Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia**



Sumber: BPS. 2021 diambil dari <https://www.bps.go.id/>

Terus meningkatnya jumlah penduduk tersebut tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada peningkatan penyediaan kebutuhan hidup dasar seperti kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal/permukiman). Terkait dengan kebutuhan dasar ini terutama dalam aspek permukiman di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar yakni dengan masih banyaknya permukiman kumuh.

Di tahun 2014 luas kawasan permukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.431 Ha. Telah banyak dilakukan berbagai upaya penanganan masalah permukiman kumuh (Yonaldi, 2016) namun hingga tahun 2018 masih belum bisa terselesaikan dengan tuntas menyisakan 23.656 ha wilayah yang masih kumuh (Direktorat PKP.2022).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 mengamanatkan jika dalam rangka meningkatkan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembang permukiman kumuh baru, serta penghidupan berkelanjutan dapat dilakukan dengan membangun dan mengembangkan kawasan perkotaan. Dalam RPJMN 2015-2019 Kota Tanpa Kumuh (kotaku) merupakan inisiasi yang dijadikan

program untuk mengatasi permukiman kumuh dengan platform kolaborasi. Program KOTAKU ini akan menangani permukiman kumuh menggunakan platform kolaborasi yang dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan kelompok swadaya masyarakat (Kementerian PUPR, 2017). Penanganan permukiman kumuh melalui Program Kotaku dengan platform kolaborasi diselenggarakan di 271 Kota/Kabupaten yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia (Kementerian PUPR, 2016), salah satunya Kabupaten Karanganyar.

Tingginya arus urbanisasi dari kota-kota besar di sekitarnya menyebabkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektornya. Bersamaan berkembangnya Kabupaten Karanganyar, maka terjadi pula peningkatan kawasan terbangun (*built up area*). Perubahan tersebut juga mengakibatkan bertambahnya kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman. Hal tersebut, menyebabkan timbulnya permukiman kumuh tidak layak huni di beberapa wilayah kecamatan kota, seperti: Kecamatan Colomadu, Kebakkramat, Jaten, Karanganyar, dan Tasikmadu (Kabupaten Karanganyar, 2016).

Memang semenjak dijalankan program KOTAKU, Kabupaten Karanganyar telah berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan kumuh, tetapi target 0 ha permukiman kumuh di tahun 2019 yang tercantum dalam RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan ) belum dapat dicapai. Wilayah Kabupaten Karanganyar yang masih terdapat permukiman kumuh berada di Kecamatan Jaten. Kecamatan Jaten menjadi wilayah dengan pemanfaatan lahan perkotaan terbesar di Kabupaten Karanganyar yakni seluas 1,505.23 ha. Secara Geografis Kecamatan Jaten berada di daerah pinggiran Kabupaten Karanganyar yang terdampak besar oleh arus urbanisasi dari kota besar sekitarnya sehingga banyak tercipta permukiman kumuh dan tidak layak huni (Kabupaten Karanganyar, 2016).

Penanganan kumuh melalui program KOTAKU di Kecamatan Jaten belum terselesaikan karena berbagai permasalahan yang muncul menjadi kendala penanganan kumuh. Seperti salah satu wilayah Kecamatan Jaten yang masih kumuh berada di desa Ngringo, penanganan kumuh tertunda karena permasalahan legalitas terkait status kepemilikan lahan (Sidiq, 2019). Padahal seharusnya penentuan kawasan kumuh tersebut sudah harus dibahas sejak dalam tahap perencanaan terkait dengan legalitasnya.

Asisten Koordinator Kota Mandiri Kabupaten Karanganyar Ir Supriadi mengatakan bahwa memang pada dokumen perencanaan sebelumnya belum dilakukan kolaborasi bahkan pihak tim kotaku sendiri tidak ikut terlibat hanya terima jadi sehingga salah sasaran wilayah yang direncanakan. (wawancara, 24 Maret 2021)

Target dan sasaran program KOTAKU Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam RP2KPKP 2016 telah berakhir di tahun 2019. Dimana target belum tercapai sepenuhnya dan masih menyisakan pemukiman kumuh. Oleh karena itu penting dalam perencanaan dilakukan kolaborasi berbagai stakeholder guna menyusun dokumen perencanaan yang memperhatikan berbagai aspek guna tercapainya hasil yang baik. Untuk tahun 2021 program kotaku di kabupaten karanganyar sudah berada di tahap perencanaan kembali.

Dalam tahap perencanaan program kotaku, stakeholder yang terlibat diantaranya Pemerintahan Desa, BKM/LKM, TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif),

Masyarakat, Pokja, Tim Fasilitator, Koordinator Kota (Kementerian PUPR, 2018). Pelibatan berbagai unsur stakeholder dalam program kotaku tersebutlah yang mengarahkan pada tata kelola pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance. Melihat Program KOTAKU dilakukan dengan berbagai stakeholder yang berproses bersama dengan arah tujuan yang sama namun program belum mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses kolaborasi stakeholder dalam perencanaan program KOTAKU, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil dalam perencanaan program Kotaku di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

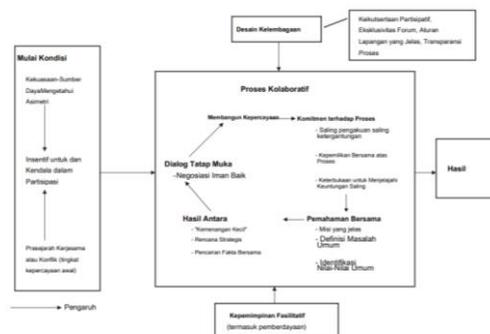
Terdapat banyak definisi kolaborasi stakeholder yang dikemukakan oleh banyak ahli dengan berbagai sudut pandang. Dalam Mutiarawati & Sudarmo (2017) mengemukakan jika kolaborasi merupakan respon terhadap perubahan lingkungan kebijakan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah aktor kebijakan, isu-isu yang semakin meluas dan kompleks, kapasitas pemerintah yang terbatas sementara institusi non pemerintah terus meningkat serta cara berpikir masyarakat yang semakin kritis. Ketika perubahan itu terjadi pemerintah harus segera menyelesaikan dan mengatasi isu yang terkait dalam perubahan tersebut (Mutiarawati & Sudarmo, 2017).

Sementara dalam Haryono (2012) Kolaborasi dimaknai sebagai suatu kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Para pihak yang berkolaborasi mempunyai berbagai kesamaan yakni: tujuan, persepsi, kemauan dalam berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Dari Konsep-konsep kolaborasi yang telah dipaparkan diketahui bahwa Kolaborasi merupakan suatu proses pengaturan yang melibatkan sejumlah stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah yang memiliki berbagai kesamaan untuk mencapai tujuan bersama. Dilakukannya kolaborasi ini didorong sebagai upaya menyelesaikan persoalan dalam suatu kebijakan. Keberjalanan pelaksanaan suatu kebijakan biasanya terdapat keterbatasan pemerintah dalam mengatur/mengelola permasalahan publik yang semakin kompleks. Karena keterbatasan tersebut maka tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pihak stakeholder melainkan memerlukan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu terdapat definisi collaborative governance menurut Ansell and Gash (2007:544) mendefinisikan collaborative governance sebagai suatu pengaturan yang mana terdapat satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan stakeholder non-pemerintah dalam pengambilan keputusan kolektif, bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang memiliki tujuan untuk membuat, mengimplementasikan atau mengelola kebijakan publik ataupun program-program serta aset publik. (Ansell & Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice, 2007).

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash merupakan kondisi awal dalam suatu kolaborasi. Terdapat beberapa fenomena yang mempengaruhinya yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang hendak diraih, kerjasama yang terjadi di masa sebelumnya, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders, ketidakseimbangan, kekuatan, pengetahuan serta sumber daya (Tilano & Suwitri, 2019).

**Gambar 2.**  
**Model Collaborative Governance Ansell dan Gash**



Sumber: Ansell & Gash, 2007

Model kolaborasi tersebut menjadi penting dalam pembahasan terkait strategi kolaborasi yang kerap berubah konteksnya. Variabel proses kolaborasi menjadi inti dari model tersebut. Dikatakan dalam Ansell & Gash 2007 apabila seluruh proses kolaborasi itu penting karena proses kolaboratif sulit untuk diwakili karena karakter interaksinya yang nonlinier.

Proses Kolaborasi menurut Ansell and Gash (2007) meliputi:

- a. **Dialog tatap muka**  
 Pada proses ini dialog tatap muka antar para stakeholder digunakan untuk membangun seluruh tata kelola kolaboratif, yang berorientasi pada konsensus. Proses ini diperlukan bagi para stakeholder untuk mengidentifikasi peluang agar dapat saling menguntungkan. Pengaplikasian dialog tatap muka ini dapat dilihat dari intensitas kehadiran dari anggota di setiap agenda rapat.
- b. **Trust Building (membangun Kepercayaan)**  
 Proses kolaboratif mencakup tentang bagaimana membangun suatu kepercayaan bukan hanya mengenai negosiasi. Membangun kepercayaan menjadi fase yang berbeda dari dialog dan negosiasi. Seringkali dalam suatu proses kolaboratif terjadi ketidakpercayaan antar stakeholder yang terlibat. Trust building ini harus ada sejak kolaborasi akan dilakukan karena kepercayaan merupakan kunci dari masing-masing stakeholder mampu menjalankan pemberian tugas terhadap stakeholder lainnya hal ini dapat

dilihat apakah ada surat-surat perjanjian untuk menguatkan kepercayaan masing-masing stakeholder.

c. *Commitment to the Process* (Komitmen terhadap proses)

Komitmen erat kaitannya dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif. Komitmen terhadap proses berarti pengembangan keyakinan yang baik supaya dapat saling memberikan manfaat dalam proses mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Dalam melihat variable ini dilihat dari loyalitas stakeholder dalam menerapkan prinsip kolaborasi sesuai dengan prinsip kolaborasi program kotaku.

d. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pada proses kolaborasi ini, masing-masing pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman bersama tentang apa yang bisa diraih bersama. Pemahaman bersama disini diartikan sebagai suatu kesepakatan tentang pengetahuan relevan yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan. Dilihat apakah masing-masing stakeholder memahami tujuan program atau hanya menjalankan tugas sesuai tupoksi instansi.

e. *Intermediate Outcomes*

Merupakan hasil proses kritis (berupa kemenangan kecil) yang penting untuk membangun momentum, dapat mengarah pada berhasilnya suatu kolaborasi. Kemenangan kecil ini dapat menjadi masukan dalam proses kolaboratif, selain itu juga dapat menjadi dorongan dalam siklus kebijakan, membangun kepercayaan serta komitmen.(Ansell & Gash, 2007). Penerapannya dengan melihat apa saja yang telah dicapai dari tahapan misalnya dalam permukiman kumuh hasil yang dicapai ialah adanya pengurangan permukiman kumuh dan tercapainya target dalam perencanaan.

Dari pendapat Ansell dan Gash (2007) dapat disimpulkan jika collaborative governance melibatkan para stakeholder yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama dalam membuat atau mengimplementasikan kebijakan. Proses Kolaborasi penting diketahui untuk menarik perhatian terkait strategi yang berubah karena adanya perubahan lingkungan kebijakan. Pengaplikasian teori dalam penelitian ini nantinya dilihat dari kehadiran rapat masing-masing stakeholder, bentuk-bentuk perjanjian yang dapat menguatkan kepercayaan,loyalitas yang dilihat dari penerapan stakeholder terhadap prinsip kolaborasi program kotaku, pemahaman terhadap tujuan program atau hanya menjalankan sesuai tupoksi instansi terkait, dan pencapaian-pencapaian yang telah diraih selama pelaksanaan program.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang dipilih dengan pertimbangan data yang diperoleh dari Dokumen Juklak Pelaksanaan KOTAKU di Tingkat Kelurahan/Desa. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, dilakukan dengan mengkonfirmasi atau mengecek kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber yang berbeda. Sedangkan dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Adanya program KOTAKU dimaksudkan agar dalam penanganan permukiman kumuh dapat terbangun sistem yang terpadu. Dimana pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan *stakeholders* sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam tahap perencanaan ataupun pelaksanaannya.

Di tahun 2020 dimulai perencanaan kembali untuk Kawasan kumuh di Kabupaten Karanganyar termasuk untuk wilayah Kecamatan Jaten. Wilayah yang dijadikan target untuk penanganan terdapat 3 kawasan yakni Bulu, desa Jaten (4 RT), Puntukrejo desa Ngringo (3 RT), Widoro desa brujul (1 RT). Dalam perencanaannya program Kotaku di Kecamatan Jaten harus mengacu pada dokumen perencanaan dan studi terkait penanganan kawasan kumuh yang telah dihasilkan Pemerintah kabupaten Karanganyar, seperti Rencana Tata Ruang, Perencanaan teknis sektoral lingkup cipta karya, kebijakan daerah dalam penanganan kumuh dsb. Hasil akhir dari perencanaan program kotaku di tingkat basis ini ialah adanya dokumen perencanaan untuk penanganan permukiman kumuh yakni adanya Baseline, Profil Kumuh, RPLP, dan RP2KPKPK untuk tingkat Kabupaten. Perencanaan program KOTAKU terdiri dari beberapa tahap, meliputi:

- 1) Membangun Visi

Membangun visi bertujuan agar perencanaan yang dibuat menjadi lebih terarah dan strategis. Perumusan visi dan misi menjadi tanggung jawab bersama maka penting dirumuskan secara berkolaborasi agar dalam menyusun strategi dapat mengurai perbedaaan kondisi saat ini dengan cita-cita kondisi ideal kawasan permukiman yang ingin dicapai.

- 2) RPK (Refleksi Perkara Kritis)

RPK bertujuan untuk menemukan penyebab terjadinya kekumuhan serta menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat untuk

berkontribusi (baik dalam hal tenaga, pikiran, waktu, berdemokrasi, dsb) untuk memperbaiki kondisi permukiman di wilayahnya.

Masyarakat diharapkan mampu menemukan solusi dan perbaikan kondisi permukiman yang dapat dimulai dari diri sendiri.

- 3) Pemetaan swadaya  
Mencakup Persiapan pemetaan swadaya, Kegiatan yang dilakukan diantaranya melakukan konsolidasi kelengkapan data, dokumen perencanaan dan peta-peta yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan. Yang kedua Pelaksanaan Pemetaan Swadaya, mereview data baseline, identifikasi persoalan potensi dan kendala pengembangan permukiman, serta kajian/ analisis hasil pemetaan swadaya.
- 4) Penyusunan Rencana Penataan lingkungan Permukiman (RPLP)  
RPLP merupakan dokumen perencanaan desa/kelurahan yang disusun secara partisipatif dan kolaborasi yang selanjutnya disepakati oleh pemerintah desa dan masyarakat. Muatan inti dokumen ini terkait dengan perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman termasuk peningkatan kehidupan berkelanjutan.

Dalam dokumen Petunjuk Pelaksanaan program KOTAKU tahun 2018 disebutkan jika pelaku Program kotakaku terdiri dari Pelaku tingkat Nasional, Pemerintah daerah dan Pokja PKP, Lurah/Kepala Desa, BKM/LKM, TIPP, Tim Koordinator Kota dan Fasilitator Kelompok (Faskel). Sementara dalam tahap Perencanaan KOTAKU di tingkat Basis desa pihak yang terlibat diantaranya:

1. Pokja PKP  
Pokja PKP ini terdiri dari berbagai unsur SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menangani permukiman kumuh. Pembentukan Pokja di Karanganyar tertuang dalam Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 050/168 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar. Di Tingkat basis kelurahan tidak seluruh SKPD dalam pokja pkp terlibat langsung dalam tahap perencanaan. Instansi yang terlibat di tingkat basis kelurahan diantaranya DPUPR dan Baperlitbang. DPUPR dan Baperlitbang ini menjadi pemrakarsa kegiatan kotakaku dalam perencanaan sesuai yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku 2018
2. Lurah/ Kepala Desa
3. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
4. TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif)
5. Tim KOTAKU berperan untuk:
6. Fasilitator Kelompok (Faskel)

Seluruh stakeholder tersebut terlibat dalam setiap tahapan perencanaan program sesuai dengan peranan masing-masing. bentuk kegiatan dalam perencanaan kotakaku

yang dilakukan oleh para stakeholder meliputi: tahap pemahaman visi dan Refleksi perkara kritis melalui sosialisasi pemberian pemahaman tentang bagaimana program dijalankan untuk menyelesaikan masalah, pemberian motivasi, dan membangun kesadaran kritis masyarakat yang difasilitasi oleh tim KOTAKU dan fasilitator kelompok. Selanjutnya di tahap pemetaan swadaya digunakan metode baseline melalui kuesioner, kuesioner yang mengisi masyarakat terkait dengan kondisi lingkungannya. Pada tahap penyusunan Rencana Penataan lingkungan Permukiman RPLP dilakukan dengan mengadakan Rapat Koordinasi dan penyelenggaraan lokakarya untuk mengkonsolidasikan data-data yang dibutuhkan. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan dalam perencanaan tersebut dapat dilihat jika ada kolaborasi yang dilakukan stakeholder untuk mencapai tujuan dalam perencanaan yakni tersusunnya Dokumen salah satunya RPLP.

#### **Kolaborasi stakeholder dalam Perencanaan Program KOTAKU**

Penyelesaian masalah kumuh perlu dilakukan perencanaan yang terarah dan ditentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Dalam perencanaan terdapat tahap menentukan visi, menemukan penyebab terjadinya kekumuhan/ pendefinisian masalah, kemudian memetakan data-data yang didapatkan, hingga akhirnya menyusun dokumen perencanaan. Semua tahapan tersebut diperlukan peran dari berbagai pihak terkait dalam penyelesaiannya sehingga untuk para stakeholder perlu melakukan kolaborasi guna menyelesaikan masalah kekumuhan.

Adanya proses kolaborasi yang dilakukan dalam perencanaan program kotakuku di Kecamatan Jaten maka dilakukan kroscek terhadap indikator yang meliputi proses kolaborasi. Maka penelitian ini dalam melihat proses kolaborasi menggunakan sejumlah indikator proses kolaborasi dari Ansell dan Gash, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. *Face to Face Dialogue* (dialog tatap muka)

Proses kolaborasi diawali dengan adanya dialog tatap muka, yang dilaksanakan untuk mengetahui berbagai kesempatan supaya antara pihak yang terlibat sama-sama memperoleh keuntungan.

Dialog tatap muka terdapat di setiap tahapan perencanaan dimana seluruh stakeholder ikut terlibat di dalamnya. Pada tahap membangun visi dan RPK dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh masyarakat. Pada tahapan Pemetaan swadaya terdapat lokakarya untuk mengkoordinasikan wilayah mana saja di kecamatan jaten yang terduga kumuh untuk kemudian akan dilakukan baseline. Pada tahap penyusunan RPLP seluruh stakeholder melakukan rapat koordinasi guna terwujud dokumen yang selaras dan terkonsolidasi. Berjalannya dialog tatap muka pada perencanaan program KOTAKU di Kecamatan Jaten juga ditemukan kendala waktu untuk rapat yang melibatkan BKM dimana harus menyesuaikan kesibukan dari anggota bkm.

Adanya dialog tatap muka antar stakeholder ini bisa dilihat dari adanya dokumentasi foto dan berita acara.

**Gambar 3.**

**Rapat Koordinasi Faskel dan Askot Kotaku Karanganyar**



*Sumber: Dokumen Berita Acara KOTAKU Karanganyar*

2. *Trust Building/Membangun Kepercayaan*

Banyaknya pihak yang terlibat seringkali dalam suatu proses kolaboratif terjadi ketidakpercayaan antar stakeholder yang terlibat, karena itu kepercayaan sangat penting dibangun dalam berkolaborasi. Hal ini juga berlaku dalam proses kolaborasi dalam perencanaan program Kotaku di Kecamatan Jaten.

Trust building dalam proses kolaborasi pada Perencanaan program KOTAKU di Kecamatan Jaten telah terbangun sejak akan memulainya kolaborasi. Tidak ada mou yang dibuat bkm/ masyarakat untuk meningkatkan rasa percaya, sehingga untuk menumbuhkan kepercayaan para stakeholder khususnya masyarakat pada tahapan membangun visi dan RPK dilakukan secara motivasional dengan cara memberikan motivasi kesadaran bersama jika kekumuhan itu merupakan persoalan bersama dan perlu diselesaikan secara bersama. Peningkatan kepercayaan kepada masyarakat tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang difasilitasi oleh askot mandiri kotaku. Sementara pada tahap Pemetaan Swadaya dan Penyusunan RPLP dikatakan Kepercayaan telah terbangun. Terbangunnya Kepercayaan ini bisa dilihat dari pernyataan BKM jika mereka telah terbuka apabila dimintai data-data yang diperlukan untuk perencanaan misalnya dalam hal pemetaan masalah

3. *Commitment to the Process/ Komitmen terhadap proses*

Komitmen berkaitan erat dengan motivasi stakeholder dalam berpartisipasi di program kotaku, dengan tumbuhnya motivasi dalam diri stakeholder maka akan timbul komitmen untuk menjalankan program.

Adanya pemahaman bersama dalam perencanaan program kotaku di kecamatan Jaten diperoleh bahwa komitmen membangun visi dilakukan dalam bentuk kesediaan stakeholder untuk meluangkan waktu dan tenaga. Pada tahap RPK dilakukan dengan kesediaan memberikan ide-ide, masukan

dan saran. Selanjutnya tahap pemetaan swadaya dilihat dengan dilakukannya metode pemetaan masalah yang tepat sasaran yakni metode propsi. Dan terakhir tahap penyusunan RPLP komitmen ditunjukkan dengan profesionalitas dalam menjalankan peran masing-masing stakeholder.

4. *Shared Understanding*/Pemahaman Bersama

Pada proses pemahaman bersama masing-masing stakeholder harus memiliki pemahaman bersama tentang apa yang bisa diraih bersama. Pemahaman dalam hal ini berupa pemahaman yang sama terkait permasalahan yang ada, visi, misi, dan tujuan bersama yang dituangkan dalam perencanaan, dan juga strategi yang sama untuk melakukan perencanaan.

Adanya proses pemahaman bersama dalam perencanaan didapatkan bila dalam tahap membangun visi Pemahaman bersama dilakukan dengan sosialisasi terkait dengan visi, misi maupun tujuan apa yang hendak dicapai bersama. Dalam tahap RPK diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa persoalan kumuh ialah masalah bersama jadi masing-masing stakeholder harus memiliki kesadaran untuk ikut menyelesaikan. Selanjutnya pada tahap pemetaan swadaya perlu memiliki pemahaman terkait indikator kekumuhan, indikator tersebut yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen. Terakhir tahap perencanaan penyusunan dokumen RPLP dokumen memerlukan pemahaman jika harus diselesaikan secara kolaborasi.

5. *Intermediate Outcomes*/ Hasil Sementara

Dalam proses ini berupa apa yang dihasilkan dari kegiatan kolaborasi dalam perencanaan yang dilakukan, dimana harus menunjukkan hasil yang mempunyai manfaat dan nilai strategis sebagai modal pada tahapan yang akan dilakukan setelahnya.

Dari berbagai data yang telah diperoleh terkait dengan Hasil sementara dalam perencanaan program kotaku di Kecamatan Jaten dapat disimpulkan jika hasil sementara ialah tersusunnya dokumen perencanaan program KOTAKU. Yang mana dalam tahap membangun visi dan RPK ini ialah terbentuknya rumusan visi dan misi Bersama, ini dapat dilihat tertuang dalam dokumen RPLP. Kemudian tahap Pemetaan Swadaya hasil sementara berupa form baseline. Sementara dalam tahap menyusun RPLP Hasil yang diperoleh berupa tersusunnya dokumen RPLP di desa jaten, ngringo dan brujul.

**Faktor yang mempengaruhi**

Saat melihat proses kolaborasi stakeholder dalam tahap perencanaan ditemui pula faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan dalam perencanaan program KOTAKU di Kecamatan Jaten Karanganyar.

1. Faktor Pendukung
  - a. Sosialisasi

Dalam proses perencanaan dilakukan komunikasi dalam bentuk sosialisasi didalamnya memberikan motivasi jika penyelesaian kumuh adalah kepentingan bersama. Pemberian motivasi ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan antar stakeholder. Selain itu setelah tumbuh motivasi dalam diri stakeholder hal ini dapat meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi, oleh sebab itulah sosialisasi menjadi faktor pendukung dalam mencapai hasil perencanaan.

b. Stakeholder bersama-sama mengidentifikasi masalah

Dalam mendefinisikan masalah perencanaan di Kecamatan Jaten menggunakan metode probsi, dengan sampel yang disesuaikan indikator kriteria kekumuhan. Yang mana akan diperoleh data baseline wilayah kumuh. diperoleh data baseline wilayah kumuh.

Dengan adanya data tersebut dalam mendefinisikan masalah dapat menghindari adanya konflik dari stakeholder tentang wilayah mana saja dan kategori apa saja yang akan dibangun. Hal ini karena sudah jelas tercantum angka-angka di baseline daerah mana saja dan kategori apa saja yang menjadi prioritas sehingga stakeholder mau tidak mau harus sepakat dengan hasilnya. Hal ini mendukung pencapaian hasil karena dengan adanya data yang diperoleh dari baseline dapat menghindari risiko ketidakpercayaan stakeholder yang mampu menghambat ketercapaian hasil perencanaan.

2. Faktor Penghambat

a. Perbedaan Pendapat

Dalam berjalannya proses kolaborasi perencanaan sering ditemui kendala terkait perbedaan pendapat individu dalam menentukan kawasan kumuh yang menjadikan hambatan dalam mencapai tujuan. Perbedaan pendapat disebabkan karena ego yang menginginkan wilayahnya ditangani sementara ada wilayah lain yang lebih harus diprioritaskan.

b. Kendala Waktu

Kendala terkait waktu terutama terjadi pada BKM, hal tersebut karena BKM memiliki rutinitas tersendiri sementara tim kotak dan fasilitator juga tidak bisa memaksakan, sebab BKM basisnya merupakan relawan yang berpartisipasi atas kemauan pribadi. secara kemanusiaan membantu membangun desanya tanpa adanya imbalan.

**Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kecamatan Jaten terkait Proses Kolaborasi dalam Perencanaan program Kotaku disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan KOTAKU di Kecamatan Jaten dilakukan oleh berbagai stakeholder yang berkolaborasi. Perencanaan program KOTAKU di tahun anggaran kedua ini

dilakukan melalui berbagai tahapan yang diikuti oleh multi stakeholder diantaranya Pokja PKP, BKM, Pemerintah desa, Tim KOTAKU serta Fasilitator. Tahapan dalam perencanaan KOTAKU di kecamatan Jaten yakni tahap membangun visi dan Refleksi Perkara Kritis(RPK) yang dilakukan melalui sosialisasi, kemudian tahap Pemetaan swadaya terdapat lokakarya. Selanjutnya tahap penyusunan RPLP disusun secara partisipatif oleh para stakeholder dengan mengadakan Rapat Koordinasi.

Didasarkan pada indikator proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash. Proses Kolaborasi dimulai dengan dialog tatap muka, dialog tatap muka diikuti oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Pada tahap membangun visi dan RPK dilakukan dengan sosialisasi, tahapan Pemetaan swadaya terdapat lokakarya, dan tahap penyusunan RPLP seluruh stakeholder melakukan rapat koordinasi. Selanjutnya proses menumbuhkan kepercayaan, para stakeholder khususnya masyarakat pada tahapan membangun visi dan RPK dilakukan secara motivasional, Sementara pada tahap Pemetaan Swadaya dan Penyusunan RPLP dikatakan Kepercayaan telah terbangun sejak jadi disini tidak ada proses menumbuhkan kepercayaan karena memang sudah ada. Selanjutnya pada tahap komitmen terhadap proses, komitmen membangun visi dilakukan dalam bentuk kesediaan stakeholder untuk meluangkan waktu dan tenaga. Pada tahap RPK dilakukan dengan kesediaan memberikan ide-ide, masukan dan saran. kemudian tahap pemetaan swadaya dilihat dengan dilakukannya metode pemetaan masalah yang tepat sasaran yakni metode probsi. Dan terakhir tahap penyusunan RPLP komitmen ditunjukkan dengan adanya profesionalitas

Pada proses pemahaman bersama dalam tahap membangun visi Pemahaman bersama dilakukan dengan sosialisasi terkait dengan visi, misi maupun tujuan. Dalam tahap RPK diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa persoalan kumuh ialah masalah bersama jadi masing-masing stakeholder harus memiliki kesadaran untuk ikut menyelesaikan. Selanjutnya pada tahap pemetaan swadaya perlu memiliki pemahaman terkait indikator kekumuhan. sementara tahap perencanaan penyusunan dokumen RPLP dokumen memerlukan pemahaman bersama jika penyusunan dokumen harus diselesaikan secara kolaborasi.

Pada proses *Intermediate Outcomes/* Hasil Sementara, dalam tahap membangun visi dan RPK ini hasil sementara terbentuknya rumusan visi dan misi Bersama yang dapat dilihat dalam dokumen RPLP. Kemudian tahap Pemetaan Swadaya hasil sementara berupa form baseline. Sementara dalam tahap menyusun RPLP Hasil yang diperoleh berupa tersusunnya dokumen RPLP di desa jaten, ngringo dan brujul.

Setelah melakukan penelitian terkait dengan proses kolaborasi ditemukan pula sejumlah faktor yang menjadi penghambat dan pendorong Tercapainya tujuan dalam Perencanaan program di Kecamatan Jaten. Faktor yang menjadi pendorong

diantaranya: Faktor adanya sosialisasi dan Stakeholder bersama-sama dalam mengidentifikasi masalah. Selain itu juga terdapat faktor yang menjadi penghambat yakni Adanya Perbedaan pendapat, dan kendala waktu.

### Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- BPS & Kemendagri. 2021. Hasil Sensus Penduduk 2020. *Berita Resmi Statistik*. XXIV(7). 1-12
- Direktorat PKP. 2022. *Pengembangan Kawasan Pemukiman Perkotaan*. Diakses pada 19 Januari 2021 dari <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/perkotaan>
- Haryono, N. (2012). Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik . *Jejaring Administrasi Publik* 4(1), 47-53.
- Kabupaten Karanganyar. (2016). *Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Program KOTAKU*.
- Kementerian PUPR. (2016). *Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tingkat Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Kementerian PUPR. (2016). Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016. In *Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh (KOTAKU)*. Kementerian PUPR.
- Kementerian PUPR. (2017). *Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*. Retrieved Maret 6, 2020, from [kotaku.pu.go.id](http://kotaku.pu.go.id): <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>
- Kementerian PUPR. (2018). *Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku Tingkat Kelurahan / Desa / Kota*.
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2) 48 - 62.
- Sidiq, F. H. (2019, November 7). *Kawasan Kumuh Karanganyar Tersisa 36 Hektare*. Retrieved Juli 29, 2020, from [posjateng.id](http://posjateng.id): <https://www.posjateng.id/warta/kawasan-kumuh-karanganyar-tersisa-36-hektare-b1XpK9czy>
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. *JPPMR*, 1-18.